



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN**

**PERATURAN DESA KEDUNGMLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

f. h. 20/24
12



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN**

**PERATURAN DESA KEDUNGMLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Ah 20/24
12

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN

PERATURAN DESA KEDUNGMLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmlaten Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40);
 24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024);
31. Peraturan Desa Kedungmlaten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungmlaten Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATEN
dan
KEPALA DESA KEDUNGMLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.461.491.755,00
2. Belanja Desa	Rp 1.436.491.755,00
Surplus/(Defisit)	Rp 25.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp 25.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kedungmlaten.

Ditetapkan di Kedungmlaten
pada tanggal 20 Desember 2024

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN,



ANDRE RENDRA MIRYANTO

Diundangkan di Kedungmlaten
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KEDUNGMLATEN



SUMALI

LEMBARAN DESA KEDUNGMLATEN TAHUN 2024 NOMOR 5.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGMLATEN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.551.100,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.253.440.655,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.461.491.755,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	378.021.551,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.619.304,00	
5.3.	Belanja Modal	438.450.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.436.491.755,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGMLATEN, 20 December 2024
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KEDUNGMLATEN
 ANDRE RENDRA MIRYANTO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGMLATEN
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	206.551.100,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.253.440.655,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.461.491.755,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>631.784.755,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	499.420.755,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.633.226,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.633.226,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	185.231.137,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	151.131.137,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.440.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.440.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.781.204,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.781.204,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.270.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.270.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.850.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.015.188,00	ADD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	3.115.188,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	4.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	150.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	150.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.371.900,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.371.900,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	25.371.900,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.810.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	6.810.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.810.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.810.200,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.025.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.310.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.245.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.245.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.025.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.925.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.489.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.489.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	44.791.200,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.791.200,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	27.371.900,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.371.900,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.371.900,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.000.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>499.330.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	168.300.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	127.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	15.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.500.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	271.030.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	9.140.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.140.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	135.874.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	135.874.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	119.910.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	119.910.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	6.106.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.106.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	DDS
2.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>37.150.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.650.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.650.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.200.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.650.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.650.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>177.827.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	25.000.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	121.295.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	116.295.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	116.295.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.100.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.100.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.432.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	432.000,00	ADD
4.6.99	5.1.	Belanja Pegawai	432.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>90.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.436.491.755,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEDUNGMLATEN, 20 December 2024
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KEDUNGMLATEN
 ANDRE RENDRA MIRYANTO
 KECAMATAN LENGKONG

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGMLATEN KECAMATAN LENGKONG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.461.491.755,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>206.551.100,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			8.551.100,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			8.551.100,00
	01. BUMDES MEKAR SEMBODO	PAD	1 Paket	5.000.000,00
	02. BUMDESMA MAKARYO	PAD	1 Paket	3.551.100,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			<u>198.000.000,00</u>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			198.000.000,00
	01. HASIL LELANG TKD	PAD	1 Paket	48.000.000,00
	02. HASIL LELANG BENGKOK	PAD	1 Paket	150.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>1.253.440.655,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			856.704.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			856.704.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 paket	856.704.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			<u>56.382.000,00</u>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			56.382.000,00
	01. BHPRD	PBH	1 Paket	56.382.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			<u>340.354.655,00</u>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			340.354.655,00
	01. ADD	ADD	1 Paket	340.354.655,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>1.500.000,00</u>
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00
	01. Pengembalian Belanja Tahun sebelumnya	DLL	1 Paket	0,00
4.3.6.	Bunga Bank			<u>1.500.000,00</u>
4.3.6.01.	Bunga Bank			1.500.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Paket	1.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.461.491.755,00

Disetujui,
KEPALA DESA
KEDUNGMLATEN
ANDRE RENDRA MIRYANTO

KEDUNGMLATEN, 20 December 2024
SEKRETARIS DESA
SUMALI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN

Kedungmlaten, 15 Desember 2024

Nomor : 005/35/411.507.2004/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kedungmlaten

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN



ANDRE RENDRA MIRYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN

BERITA ACARA
NOMOR 141/4/411.507.04/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KEDUNGMLATEN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATEN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2024 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDRE RENDRA M. : Kepala Desa Kedungmlaten, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Kedungmlaten yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. HANOKO : Ketua BPD Desa Kedungmlaten, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Kedungmlaten yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungmlaten, 16 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA BPD KEDUNGMLATEN,

HANOKO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA KEDUNGMLATEN,

ANDRE RENDRA MIRYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kedungmlaten
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ANDRE RENDRA MIRYANTO	L	Kepala Desa	1. 
2.	SUMALI	L	Sekretaris Desa	2. 
3.	SUTRISNO	L	Kasun I	3. 
4.	MOCH. KHOLIL	L	Kasun II	4. 
5.	MUJALI	L	Kasi Pemerintahan	5. 
6.	SYAIFUDIN ZUHRI	L	Kasi Kesra	6. 
7.	DWI FITRI NURDANIK	P	Operator Desa	7. 
8.	DIZKIE ALEN N.	P	Staf Desa	8. 


KEPALA DESA KEDUNGMLATEN
ANDRE RENDRA MIRYANTO

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 16 Desember 2024
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Kedungmlaten
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HANOKO		Ketua	1. 
2.	TRIAS WAHYU HERMANTA		Wakil Ketua	2. 
3.	VIETTA RISTIYA DEWI		Sekretaris	3. 
4.	SUPARJI		Anggota	4. 
5.	JONI AGUSTONO		Anggota	5. 



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN**

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
- Hari/Tanggal : Senin, 16 Desember 2024
- Waktu rapat : 10.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Andre Rendra Miryanto
- Sekretaris : Sumali
- Pencatat : Trias Wahyu Hermanta
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Kedungmlaten
2. Badan Permusyawaratan Desa Kedungmlaten
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Pembahasan :
- a. Anggaran DD
1. 20% Untuk Ketahanan Pangan
 2. 10% Untuk BLT DD
 3. Dan Kegiatan Wajib Lainnya yang harus dianggarkan
- b. Kegiatan Prioritas yang harus dimasukkan APBDes 2025.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA KEDUNGMLATEN,



ANDRE RENDRA MIRYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATEN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGMLATEN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATEN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungmlaten tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Kedungmlaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Kedungmlaten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMLATEN TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGMLATEN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGMLATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmlaten Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungmlaten
pada tanggal 17 Desember 2024



DOKUMENTASI
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN APBDES TA. 2025

Hari : Senin

Tanggal : 16 Desember 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA KEDUNGMLATEN

PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGMLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungmlaten Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas

- Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40) ;
 24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);
 25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
 26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
 27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);
 28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
 29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);
 30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024);

31. Peraturan Desa Kedungmlaten Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungmlaten Tahun 2024 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Kedungmlaten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kedungmlaten Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 206.551.100,00
b. Transfer	Rp. 1.253.440.655,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 1.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.461.491.755,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 631.784.755,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 499.330.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 37.150.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 177.827.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 90.400.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.436.491.755,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 25.000.000,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 25.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp. 25.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungmlaten.

Ditetapkan di Kedungmlaten
pada tanggal 20 Desember 2024

KEPALA DESA KEDUNGMLATEN,



ANDRE RENDRA MIRYANTO

Diundangkan di Kedungmlaten
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DESA KEDUNGMLATEN,



SUMALI

BERITA DESA KEDUNGMLATEN TAHUN 2024 NOMOR 4

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGMLATEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			206.551.100,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			8.551.100,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			8.551.100,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			198.000.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			198.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.253.440.655,00	
	4.2.1.	Dana Desa			856.704.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			856.704.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			56.382.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			56.382.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			340.354.655,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			340.354.655,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.500.000,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.500.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.461.491.755,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			631.784.755,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			499.420.755,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	33.633.226,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			33.633.226,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			33.633.226,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			33.633.226,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	185.231.137,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			151.131.137,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			151.131.137,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			151.131.137,00	
1.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.100.000,00	
1.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			34.100.000,00	
1.01.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			34.100.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	16.440.000,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			16.440.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			16.440.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			1.356.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			15.084.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	bulan	49.781.204,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			49.781.204,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.843.900,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.344.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.999.900,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.700.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			14.100.000,00	
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			19.237.304,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			7.573.304,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			5.964.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	23.270.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			23.270.000,00	
1.01.05.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			720.000,00	
1.01.05.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			720.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			22.550.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			22.550.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	bulan	3.850.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.850.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			700.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.150.000,00	
1.01.06.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			3.150.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	bulan	33.015.188,00	ADD
1.01.07.	5.1.	Belanja Pegawai			3.115.188,00	
1.01.07.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.115.188,00	
1.01.07.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			3.115.188,00	
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.900.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.400.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			26.400.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	paket	4.200.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.200.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
1.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.400.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.800.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.800.000,00	
1.01.90.		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	paket	150.000.000,00	PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			150.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			52.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			52.500.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			97.500.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			97.500.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			25.371.900,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	paket	25.371.900,00	PBH
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			25.371.900,00	
1.02.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			25.371.900,00	
1.02.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			25.371.900,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			6.810.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	paket	6.810.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.810.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			810.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			290.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.100.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			72.810.200,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Paket	2.025.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.025.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.425.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			340.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			585.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1	paket	3.310.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.310.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.110.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			110.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.600.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	9.245.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.245.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.395.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			660.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.935.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.850.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.650.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	paket	2.025.000,00	DDS
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.025.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.425.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			340.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			585.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
1.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1	Paket	3.925.000,00	DDS
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.925.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.04.05.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.500.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.425.000,00	
1.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.425.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	paket	1.489.000,00	DDS
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.489.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			889.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			333.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			156.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
1.04.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.04.90.		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	1	paket	44.791.200,00	PAD
1.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.791.200,00	
1.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			44.791.200,00	
1.04.90.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			44.791.200,00	
1.04.91.		Forum Pembina Desa	1	paket	6.000.000,00	ADD
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			300.000,00	
1.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
1.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.700.000,00	
1.04.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.800.000,00	
1.04.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			27.371.900,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	paket	25.371.900,00	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.371.900,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			25.371.900,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			25.371.900,00	
1.05.99.		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1	paket	2.000.000,00	PAD
1.05.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.05.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
1.05.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			499.330.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			38.800.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	1	paket	34.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			34.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			34.000.000,00	
2.01.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	1	paket	4.800.000,00	DDS
2.01.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
2.01.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.800.000,00	
2.01.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.800.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			168.300.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	paket	6.400.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.400.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.400.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			6.400.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	1	paket	127.800.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			127.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			77.880.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.280.000,00	
2.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			60.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			49.920.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			48.120.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Paket	15.600.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.600.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.600.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00	
2.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.000.000,00	
2.02.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			6.000.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	paket	16.000.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			9.000.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	paket	1.000.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
2.02.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.000.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	paket	1.500.000,00	DDS
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
2.02.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
2.02.09.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			271.030.000,00	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1	paket	9.140.000,00	DDS
2.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.140.000,00	
2.03.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			9.140.000,00	
2.03.05.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			9.140.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1	paket	135.874.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			135.874.000,00	
2.03.12.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			50.294.000,00	
2.03.12.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			50.294.000,00	
2.03.12.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			85.580.000,00	
2.03.12.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			85.580.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	2	paket	119.910.000,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			119.910.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			119.910.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			119.910.000,00	
2.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1	paket	6.106.000,00	DDS
2.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.106.000,00	
2.03.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.106.000,00	
2.03.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			6.106.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			10.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	paket	10.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
2.04.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
2.04.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			10.000.000,00	
2.05.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	paket	10.000.000,00	DDS
2.05.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.05.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
2.05.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			1.200.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	paket	1.200.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			37.150.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			2.000.000,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	paket	2.000.000,00	DDS
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.01.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			5.650.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	paket	5.650.000,00	DDS
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.650.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.950.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.700.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.200.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			4.200.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12	bulan	4.200.000,00	ADD, DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.200.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.03.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.200.000,00	
3.03.06.	5.3.	Belanja Modal			1.000.000,00	
3.03.06.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			1.000.000,00	
3.03.06.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			1.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			25.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	paket	6.650.000,00	ADD, DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.650.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			950.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.700.000,00	
3.04.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.700.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	18.650.000,00	ADD, DDS, PAD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.650.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.650.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.350.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
3.04.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.200.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
3.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.400.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			600.000,00	
3.04.03.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			600.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			177.827.000,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			25.000.000,00	
4.01.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1	paket	25.000.000,00	DDS
4.01.03.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
4.01.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00	
4.01.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			121.295.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	paket	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
4.02.04.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			5.000.000,00	
4.02.04.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			5.000.000,00	
4.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	paket	116.295.000,00	DDS
4.02.99.	5.3.	Belanja Modal			116.295.000,00	
4.02.99.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			116.295.000,00	
4.02.99.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			116.295.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			27.000.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	paket	3.000.000,00	DDS
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
4.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
4.03.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	paket	10.500.000,00	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.500.000,00	
4.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.500.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	paket	7.500.000,00	DDS
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.500.000,00	
4.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
4.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	paket	6.000.000,00	DDS
4.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
4.03.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
4.03.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			6.000.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	paket	2.100.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.100.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.850.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			250.000,00	
4.04.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			250.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			2.432.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	paket	2.000.000,00	DDS
4.06.02.	6.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
4.06.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.000.000,00	
4.06.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	paket	432.000,00	ADD
4.06.99.	5.1.	Belanja Pegawai			432.000,00	
4.06.99.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			432.000,00	
4.06.99.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			432.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			90.400.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			2.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	paket	2.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			2.000.000,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1	paket	2.000.000,00	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	DDS
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			86.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	24	KPM	86.400.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			86.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			86.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.436.491.755,00	
		SURPLUS DEFISIT			25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.2.	Pengeluaran Pombiayaan			25.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			25.000.000,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



 KEDUNGMLATEN, 20 Desember 2024
 KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 KEDUNGMLATEN
 ANDRE RENDRA MIRYANTO

